

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk dalam rukun Islam, dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu dan memiliki harta yang mencapai nisab. Perintah untuk membayar zakat diulang sebanyak 82 kali dalam ayat-ayat Al-qur'an. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*²

Sedangkan infak/sedekah merupakan salah satu ibadah mulia sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Amalan untuk berinfaq/bersedekah memiliki banyak kebaikan dan sangat dianjurkan. Manfaat zakat bagi umat muslim adalah untuk mensucikan harta benda yang dimilikinya. Dalam buku yang ditulis oleh Gambling dan Karim menyebutkan bahwa dikatakan sebagai pajak yang mengandung unsur spiritual serta bertujuan untuk mencapai keadilan dalam ekonomi dan sosial.³

² Siti Mariyati dan Puji Hermianto, *Al-Mughini Al-Qur'an Terjemahan...*, hal. 7

³ Anang Ariful Habib, *“The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109”*. (Jember : Pascasarjana Universitas Jember), hal. 2

Para ekonom telah sepakat bahwa zakat memiliki kontribusi penting bagi masyarakat dan negara, zakat juga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan fiskal negara. Pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian generasi setelahnya membuktikan bahwa zakat merupakan aset penting yang dikumpulkan melalui perbendaharaan tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai roda pemerintahan tetapi bisa juga sebagai jaminan sosial.⁴

Zakat dan infak/sedekah mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, jika dana dikelola dan didistribusikan dengan tepat maka akan menghapus kesenjangan ekonomi di suatu negara. Maka dari itu pengelolaan dan cara pendistribusian dana zakat ini juga diatur dalam Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*⁵

Sebagai bentuk pengamalan dari ayat tersebut, negara Indonesia membuat UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai upaya agar tercapai pengelolaan dana zakat yang baik, maka negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertempat di Ibu kota negara, Baznas tingkat provinsi dan Baznas tingkat kabupaten/kota. BAZNAS merupakan

⁴ Aan Jaelani, *“Zakat Accounting : Metaphor and Accounting Treatment For Business Organization”*. (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hal. 154

⁵ Siti Mariyati dan Puji Hermianto, *Al-Mughini Al-Qur'an Terjemahan...*, hal. 196

lembaga pemerintahan independen dan memiliki tanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS wajib mencatat, Menyusun dan melaporakan laporan keuangan terkait penghimpunan dan pendayagunaan dana.⁶

Potensi penerimaan zakat di Indonesia begitu besar karena Islam merupakan agama mayoritas. Berikut paparan data penerimaan dana zakat dan infak/sedekah Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia tahun 2012 sampai 2019.

Tabel 1.1
Penerimaan Kas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia
Tahun 2012 Sampai 2019

NO	Tahun	Total Penerimaan (Rp)
1	2015	98.473.103.020,77
2	2016	111.449.939.350,62
3	2017	158.752.636.318,85
4	2018	195.092.051,942,01
5	2019	296.653.588.808,87
6	2020	386.405.231.105

Sumber : Rekening zakat Laporan keuangan BAZNAS (*Audited*) diakses pada tanggal 10 September 2020

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab penuh atas laporan keuangan dan pengelolaan dana lembaga kepada masyarakat dan Pemerintah. Keberadaan organisasi Badan Amil Zakat Nasional yang semakin maju dan memiliki peran kompleks tentu sangat perlu untuk diperhatikan. Baik dari segi pengalokasian dana dan perlakuan akuntansinya.⁷

Sebagai suatu organisasi terbuka yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam menyalurkan dan menghimpun dana, Baznas memiliki tanggung jawab untuk memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

⁶ Nida Fithriyah Pradana, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik". (Surabaya : Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal. 5

⁷ Nida Fithriyah Pradana, *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat...*, hal. 6

penyajian laporan keuangan kepada *stakeholders*. Laporan keuangan yang terstruktur dapat berimbas pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat tersebut.⁸

Demi terlaksananya pembuatan laporan keuangan untuk lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat standar laporan keuangan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 sehingga bisa menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat. PSAK 109 diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pengelolaan zakat khususnya untuk BAZNAS sehingga laporan keuangan dapat berguna bagi pihak pemakai.⁹

Setidaknya ada tiga standar akuntabilitas, yakni : pertanggungjawaban dana publik, laporan keuangan yang disajikan tepat waktu dan adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal. Sedangkan transparansi dinilai dari kelengkapan informasi dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan bagi para *stakeholders*. Dengan menerapkan prinsip transparansi akan menambah tingkat kepercayaan donatur dan masyarakat luas.¹⁰

⁸ Anang Ariful Habib, “*The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS*”, hal. 2

⁹ Eka Apriliani, “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang*”. (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017), hal. 32

¹⁰ Siti Nurhasanah, “*Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*”. (Tangerang : STAI Binamadani, 2018), hal. 343

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah
Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar Tahun 2015 sampai 2020

NO	Tahun	Total Penerimaan (Rp)
1	2015	930.645.353
2	2016	946.084.893
3	2017	877.118.683
4	2018	828.532.049
5	2019	776.088.312
6	2020	716.632.489

Sumber : Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar yang diberikan pada tanggal 29 Januari 2021

Sumber penerimaan dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tahun 2020 diperoleh dari 40 lembaga pemerintahan dan 5 perorangan. Dana yang dikelola Baznas Kota Blitar cukup besar sehingga pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban sangat diperlukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teungku Savina, diketahui bahwa factor yang paling berpengaruh adalah tingkat kepercayaan Muzakki terhadap badan Amil zakat.¹¹

Berdasarkan paparan data tersebut, menunjukkan bahwa transparansi dan kualitas laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana ZIS. PSAK Nomor 109 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan agar digunakan BAZNAS sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta mampu meningkatkan transparansi dan keuangan laporan keuangan.¹²

¹¹ Teungku Savina Goldia, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang)”. (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)

¹² Eka Apriliani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang”. (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017), hal. 7

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
2. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
3. Bagaimana kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
4. Bagaimana solusi dari kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
4. Untuk mengetahui solusi dari kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Dalam Penelitian mengidentifikasi cangkupan yang mungkin tampak dalam penelitian, agar pembahasan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Identifikasi masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kemungkinan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pada Baznas Kota Blitar dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 109.
- b. Kurangnya penyajian laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan pada Baznas Kota Blitar.

- c. Adanya kendala dalam penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Blitar.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian tersebut maka batasan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada Baznas Kota Blitar.
- b. Implementasi PSAK 109 pada Baznas Kota Blitar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
- c. Kendala penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Blitar.
- d. solusi dari kendala penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Blitar

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi banyak manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat berguna untuk menambah wawasan pembaca dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun karya penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Diharapkan bermanfaat kepada lembaga agar mengetahui pentingnya melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku, pengelolaan dan pelaporan dana dilakukan secara akuntabilitas dan

transparan sehingga tujuan dari penyusunan laporan keuangan bisa bermanfaat secara maksimal untuk pengguna.

b. Bagi Akademis IAIN Tulungagung

Diharapkan penelitian ini mampu menambah literasi pustaka di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini mampu memberi tambahan wawasan dan bahan peninjau bagi pembaca dalam penetapan keputusan terkait penerapan PSAK 109 di lembaga pengelola zakat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berdasarkan judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Adalah suatu pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat.¹³

b. Transparansi

Maksud dari transparansi merupakan keterbukaan dalam proses merencanakan, menyusun, melaporkan serta alokasi dana. Sedangkan arti dari transparansi sendiri adalah keterbukaan mengenai proses dan

¹³Devi Megawati, “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”. (Riau : Universitas Riau), hal. 43

hasil. Sedangkan dalam KBBI, transparansi adalah menunjukkan hal yang sebenarnya dan diungkap dengan jelas.¹⁴

c. Akuntabilitas (pertanggungjawaban)

Akuntabilitas bisa juga disebut sebagai “Amanah”. Sifat akuntabilitas ini berarti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

d. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat data keuangan atau aktivitas perusahaan sebagai penggambaran hasil dari proses akuntansi dan digunakan sebagai alat komunikasi bagi stakeholder.¹⁶

e. Badan Amil Zakat Nasional

Merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga pengelola dan penghimpun dana zakat dan infak/sedekah yang beredar di masyarakat.¹⁷

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada Baznas Kota Blitar, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Baznas Kota Blitar, kendala

¹⁴ Mardianso, *Otonomi, Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hal. 105

¹⁵ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis laporan keuangan sektor Publik*. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), hal. 18

¹⁶ Kariyota, “*Analisa Laporan Keuangan*”, (Malang : Univesitas Brawijaya, 2017), hal. 163

¹⁷ Ahmad Mudaufah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 13

dan solusi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar. Berdasarkan informasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar akan terus melakukan penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah di wilayah Kota Blitar. Selain menerima dana dari masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar juga menerima dana dari Pemerintah Kota Blitar untuk dikelola. sehingga perlu adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang mendukung adanya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi disusun dalam tiga bagian, yaitu : bagian awal, bagian inti dan bagian akhir

BAGIAN AWAL

Bagian awal terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

BAGIAN INTI

Dalam bagian inti terdiri atas 6 bab, dan dalam setiap bab terdapat sub bab sebagai perincian atas bab-bab tersebut, penjelasan setiap bab pada bagian inti adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, focus penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan dalam penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi mengenai pembahasan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB VI Penutup, bab ini berisi saran dan kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAGIAN AKHIR

Bab ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.¹⁸

¹⁸ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. “*Pedoman Penyusunan Skripsi*”. (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017), hal. 15-24